

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Subbagian ini mengeksplorasi penelitian sebelumnya berharga dalam memberikan ringkasan singkat dan klarifikasi kerangka pemikiran penelitian. Selain itu, juga berfungsi sebagai sumber perbandingan dan bahan referensi untuk diskusi mendatang. Landasan penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat penting dalam membentuk arah dan fokus penelitian ini. Berikut yaitu penelitian terdahulu sebagai landasan penelitian ini ialah:

Pertama, Berangkat dari penelitian Petrus Gleko, Agung Suprojo, dan Asih Widi Lestari pada tahun 2017 berjudul “Strategi KPU dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, tujuannya adalah untuk mengetahui taktik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan peningkatan keterlibatan politik di masyarakat, terlebih pada kalangan pemilih pemula pada pemilu pada 2015. Pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data digunakan pada penelitian. Temuan penelitian ini mengemukakan upaya dalam melakukan upaya terhadap partisipasi politik di pemilu pasca-konflik 2015 dapat dikategorikan ke dalam tiga tahap pelaksanaan. *Pertama*, pada tahap perumusan dan sasaran jangka panjang, terdapat kejelasan mengenai rencana sosialisasi yang ditetapkan KPU. *Kedua*, pada tahap seleksi tindakan, KPU mensosialisasikan pada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasi yang beragam, termasuk interaksi tatap muka dan penggunaan media sosial. Bentuk pelaksan yang dilakukan sesuai karakteristik segmen yang dibidik. *Ketiga*, tahap alokasi sumber daya terdapat aktifitas peningkatan sumber daya dengan bimbingan teknis ke anggota badan Ad Hoc seluruhnya yang nantinya akan menjadi petugas pelaksana sosialisasi pemilu. Namun, dalam realisasi strategi KPU ini terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya dukungan finansial yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi, kurang minatnya masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan minimnya jumlah sumber daya manusia di KPU sehingga belum bisa Menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Malang (Gleko et al. 2017). Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis mengenai strategi KPU untuk melakukan peningkatan keterlibatan

politik pada pemilih pemula. Kedua studi tersebut mendalami strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada politik. Namun, perbedaan halus terletak pada fokus kedua investigasi tersebut. Kajian penulis secara khusus dengan tujuan mengungkap strategi KPU Kota Batu dalam penumpuhan partisipasi pemilih pemula pada politik. Perbedaan ini menyoroti perbedaan dalam subjek dan tujuan penelitian.

Kedua, penelitian bertajuk “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Pontianak Barat” yang dilakukan oleh Moad Yeswanto pada tahun 2018 dengan maksud untuk mengetahui tindakan dan inisiatif yang dilakukan oleh KPU. KPU mendorong partisipasi politik oleh pemilih pemula di kabupaten tersebut. Metode Ex Post Facto, melihat ke belakang untuk mengidentifikasi penyebab potensial dari suatu peristiwa setelah peristiwa tersebut terjadi, adalah metodologi penelitian dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak mengadakan pendidikan politik agar memenuhi amanat fungsi sosialisasi politik seperti pada Undang-Undang Nomor 15 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu. KPU Kota Pontianak menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan master of ceremony di sekolah-sekolah guna memberi pendidikan politik pada pemilih pemula, (Moad 2018). Program yang dibuat oleh KPU merupakan Program yang dibuat belakangan dan memiliki desain yang unik yang mencakup tujuan, strategi, sumber daya, dan pembicara yang ditentukan oleh KPU. Dalam program sosialisasi terdapat pemaparan materi yang berhubungan dengan pemilu. Dalam sosialisai ini terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Pontianak seperti metode tatap muka serta dialog, melalui media social, pemanfaatan kegiatan masyarakat yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi yang berhubungan dengan pemilihan umum. Sosialisasi yang dilakukan juga memanfaatkan beberapa pihak seperti Badan Ad Hoc (PPS dan PPK) dan juga melalui tokoh masyarakat. Namun, dalam realisasi sosialisasi yang dilakukan KPU menghadapi hambatan yaitu kurangnya kapasitas pemikiran sumber daya manusi yang dimana terdapat perbedaan pemahaman serta minimnya partisipasi masyarakat. Terdapat kesamaan antara penelitian terbaru dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai taktik yang digunakan KPU dalam mendorong pemilih pemula agar berpartisipasi dalam politik. Namun juga terdapat sedikit perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait subjek serta

metode berbeda. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif dengan metodologi penelitian kualitatif.

Ketiga, Tujuan dari penelitian "Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020" oleh Qorina Lois Fadilla dkk. yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peningkatan jumlah pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil dari studi ialah Strategi digunakan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi Pendidikan pemilih. Selain interaksi tatap muka terbatas dan pertemuan daring, KPU Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai bagian dari penjangkauan untuk mendorong pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. RPP ini dimanfaatkan untuk sarana fasilitas pelajar serta mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan sebagai sarana edukasi mengenai pemilu. Untuk menarik minat masyarakat datang ke RPP dengan cara menampilkan materi yang menarik dalam bentuk game, video, kaeidoskop serta dilengkapi dengan audio (Fadilla and Nurussa'adah 2022). Terdapat sedikit perbedaan dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya, yakni mengenai strategi. Jika penelitian terdahulu lebih berkonsentrasi pada taktik komunikasi, penelitian ini lebih terfokus pada strategi KPU. Perbedaan berikutnya adalah strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, dimana strategi komunikasi yang di gunakan milik Harold Lasswell sedangkan penelitian ini tidak menggunakan strategi komunikasi. Tak sedikit juga persamaan antara kedua penelitian ialah sama sama mengambil Partisipasi Pemilih Pemula.

Keempat, "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang" oleh Dewi Sri Lestari, dkk. pada tahun 2020 yang mencoba memperjelas bagaimana strategi KPU melakukan peningkatan partisipasi politik pada pemilih pemula dalam melakukan peningkatan jumlah pemilih pemula yang berpartisipasi terhadap pemilihan Bupati Kabupaten Pinrang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori Salusu dan dikombinasikan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian menunjukkan pendekatan KPU yakni berkolaborasi dengan relawan demokrasi dan sejumlah lembaga atau organisasi lokal

untuk memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan sosialisasi pada komite yang terlibat pada sosialisasi sebagai upaya peningkatan kinerja. Dalam hal ini, KPU membentuk Relawan Demokrasi yang bertujuan memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih. Bimbingan teknis dilakukan kepada relawan demokrasi agar nantinya bisa lebih maksimal dalam memberikan informasi terkait dengan pemilu. Siswa sekolah menengah atas, mahasiswa, dan masyarakat umum adalah beberapa kelompok yang menjadi sasaran sosialisasi ini sesuai dengan strategi yang telah dikembangkan melalui penggunaan media massa. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dialami seperti sikap acuh pelaihar terhadap hak serta kewajibannya sebagai warga negara yang baik, adanya pengaruh dari keluarga dalam memilih kandidat serta menjatuhkan pilihannya sesuai dengan pilihan keluarga, adanya perasaan kurang percaya diri dan merasa dirinya tidak pantas dalam kegiatan politik (Lestari, Azikin, and Rahim 2020b). Beberapa kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dan pembahasan kebijakan KPU mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam politik. Yang membedakan studi terdahulu dengan penelitian ini ialah tempat penelitiannya.

Kelima, "Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015" merupakan penelitian Dwi Haryono pada 2018 yang mencoba melihat bagaimana strategi KPU melakukan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota Samarinda tahun 2015. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif diterapkan. Penelitian menemukan bahwa KPU Kota Samarinda menggunakan penguatan kelembagaan, indoktrinasi politik, dan pendidikan pemilih untuk pemilih pemula sebagai taktiknya. Penguatan kelembagaan adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk menata organisasi atau lembaga tersebut agar dapat meningkatkan keterlibatan pemilih sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam aktualisasinya penguatan kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan komunikasi sebagai saluran terbuka untuk berbagi informasi dari KPU kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas badan-badan Ad Hoc. Strategi sosialisasi politik juga menjadi salah satu upaya sosialisasi tatap muka dan melalui media yang dilakukan oleh pihak KPU secara langsung dengan masyarakat dan melalui media cetak, penyiaran, dan elektronik. Taktik terakhir adalah rencana

pendidikan pemilih pemula dari KPU, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula (Haryono 2018). Terdapat beberapa kesamaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya, seperti metodologi kualitatif dan deskriptif. Namun, juga ditemukan sedikit perbedaan dari kedua penelitian yaitu fokus dari penelitian. Penelitian terdahulu berfokus dalam partisipasi pemilih sedangkan penelitian ini menggunakan keterlibatan pemilih pemula dalam politik.

Keenam, Penelitian "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu Raden Paku" oleh Qurotul Fitriani dkk. 2018 bertujuan untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik meningkatkan pemilih pemula untuk berpartisipasi politik. Teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, KPU Kabupaten Gresik menggunakan Rumah Pintar Pemilu Raden Paku, program pendidikan pemilih, dan sosialisasi pemilu. Dalam RPP Raden Paku terdapat program pendidikan berbasis keluarga dan *goes to school* atau kampus. KPU Kabupaten Gresik bekerja sama dengan lembaga sosialisasi politik yang sederhana seperti keluarga, sekolah dan juga media massa dalam melakukan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula. Pendidikan politik KPU Kabupaten Gresik terkategori atas tiga, pendidikan pemilih, sosialisasi pemilu, dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam sosialisasi yaitu tatap muka secara langsung terhadap peserta, diskusi umum dengan teknik penyampaian materi mengumpulkan peserta dalam ruangan dan materi disampaikan melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kemudian media yang digunakan adalah media informasi seperti iklan radio, facebook dll. Media penyampaian materi dengan video, film, dan slide power point. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pemilihan umum, demokrasi, dasar-dasar tupoksi KPU dan yang lainnya. Pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat persamaan di dalamnya seperti Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Namun, Jika penelitian sebelumnya membahas upaya KPU Kabupaten Gresik dalam melakukan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dengan Rumah Pintar Pemilu Raden Paku, penelitian ini berfokus pada strategi KPU melakukan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu 2024. Kedua penelitian ini sedikit berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kedua penelitian ini ialah objek dan subjeknya.

Ketujuh, Tujuan dari penelitian "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Malaka" oleh Maria et al. yakni untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pada pemilihan kepala daerah oleh pemilih pemula di Kabupaten Malaka. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. (Bouk, Festianto, and Seran 2022). Temuan studi ini menunjukkan berbagai upaya dan taktik yang dilakukan KPU Kabupaten Malaka, termasuk menyederhanakan kinerja tim dalam memperkenalkan pemilih pemula pada proses pemilu dan berkolaborasi serta berkoordinasi dengan Lembaga Sosialisasi Penyelenggara Pemilu atau organisasi atau institusi yang berhubungan, sosialisasi serta publikasi penyelenggaraan pilkada dengan optimal, terbuka serta berhubungan dengan pemanfaatan pontesi yang ada di daerah, meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pilkada, mengoptimalkan penggunaan SDM serta proses perencanaan kebutuhan pilkada dengan cara mengelola proses atau tahapan pilkada dengan baik. KPU Kabupaten Malaka telah Menyusun program dan anggaran serta sudah menetapkan relasi kerja dan sudah adanya sosialisasi pemilih pemula. Namun dalam realisasi sosialisasinya terdapat penghambat seperti luasnya wilayah serta banyaknya penduduk dan terbatasnya SDM di KPU Kabupaten Malaka sehingga belum bisa menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Malaka. Tidak hanya itu KPU Kabupaten Malaka sudah memaksimalkan sosialisasinya melalui media massa namun masih terdapat hambatan dikarenakan banyak masyarakat yang hidup di pelosok yang tidak bisa menjangkau jaringan internet dan juga tidak terjangkau jaringan pelatihan. Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pendekatan yang digunakan KPU dalam mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam politik dan menggunakan metode penelitian yang sama-metode kualitatif deskriptif. Namun, ada beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini menggunakan teori J. Salusu, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Mohtar Mos'oed. Tidak hanya itu perbedaan dari kedua penelitian ini ialah tempat penelitiannya yang berbeda.

Kedelapan, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Israq Miqraj dkk. (Miqraj and Nurmasari 2018) dengan judul "Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Dumai di Kecamatan Dumai Barat Tahun 2015" berusaha untuk mengetahui dan mengevaluasi pendekatan KPU meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Walikota Dumai. Dengan fokus pada serangkaian kuesioner, wawancara, dan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, pendekatan studi yang digunakan adalah kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian yaitu beberapa rencana yang menjadi patokan KPU yaitu *Pertama*, Strategi visi KPU adalah meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan membina kolaborasi, membuat dan melaksanakan rencana, serta mewujudkan berbagai kemauan kreatif. *Kedua*, strategi misi KPU tentang produk serta oelayanan yang ditawarkan, strategi permasalahan ataupun kebutuhan yang harus di tanggulangi serta strategi golongan yang harus dilayani. *Ketiga*, strategi kebijakan KPU yang diterapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan, memberikan petunjuk ke setiap usaha yang dilakukan, kesamaan upaya dalam mencapai sasaran, tujuan, misi serta visi. *Keempat*, strategi KPU mengenai realisasi sosialisasi pada waktu yang ditentukan. Sumber daya yang sudah tersedia dan mengimplementasikan apa saja dengan kebijakan dan program yang sedang berjalan selama pemilihan Walikota Dumai tahun 2015 Kecamatan Dumai Barat. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu persamaan ketertarikan dalam mempelajari bagaimana strategi KPU mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula. Yang membedakan kedua studi ini ialah metode penelitian yang digunakan serta subjek dan objek yang berbeda.

Kesembilan, (Zakiruddin and Lestari 2023) Tujuan dari penelitian "Era Post Truth dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula" adalah untuk mengetahui peningkatan jumlah pemilih pemula di era *post-truth* pada KPU Kota Bengkulu. Menurut penelitian ini, KPU Kota Bengkulu telah menerapkan sejumlah taktik, termasuk sosialisasi secara langsung dengan basis masyarakat kota, termasuk basis pemilih pemula. Selain itu, media sosial adalah alat lain yang digunakan oleh KPU Kota Bengkulu untuk sosialisasi. Selain mendorong masyarakat untuk memberikan suara, sosialisasi ini juga mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam berbagai tahapan pelaksanaan pemilu. KPU Kota Bengkulu bekerja sama dengan komunitas untuk mempromosikan pendidikan pemilih. Dengan mengundang pemilih pemula ke RPP KPU Kota juga digunakan sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan pemilih pemula. Namun, dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa hambatan baik

eksternal maupun internal. Pihak eksternal yang memiliki waktu terbatas, seperti KPU Kota Bengkulu, tidak dapat secara efektif menghubungi semua pemilih pemula. Kendala lainnya ialah pemilih pemula yang kondisi mentalnya belum stabil dan memiliki ego tinggi yang menjadikan tingkat kesadaran dan tanggung jawab rendah. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang terlihat dari ketertarikan terhadap taktik yang digunakan KPU meningkatkan jumlah pemilih, terutama pemilih pemula. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara kedua penelitian ini. Secara khusus, metodologi penelitian studi sebelumnya tidak dijelaskan secara eksplisit, dan dilakukan di lokasi yang berbeda, yang otomatis subjek dan objek yang berbeda secara alami.

Kesepuluh, Studi "Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat" mencoba mengklarifikasi langkah KPU Kabupaten Tuban meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Husni and Harmanto 2021). Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, KPU Kabupaten Tuban mencari cara agar meningkatkan jumlah pemilih pemula yang berpartisipasi, termasuk mengisi program sosialisasi politik, mendidik pemilih pemula tentang politik, dan mengorganisir relawan demokrasi. Dalam rangka menumbuhkan sosialisasi politik, KPU Kabupaten Tuban menyelenggarakan acara-acara yang menampilkan pasangan calon dan partai politik. KPU juga mengadakan pentas seni dengan doorprize untuk menarik minat masyarakat. Tujuan dari Program Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula adalah untuk membekali kelompok pemilih pemula dengan pengetahuan dan pengenalan politik lebih lanjut. Tidak hanya itu saja pembentukan relawan demokrasi guna untuk menunjang dan membantu kinerja pihak KPU Kabupaten Tuban kegiatan seperti sosialisasi dan Pendidikan politik ke masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan politik, khususnya di kalangan pemilih baru di Kabupaten Tuban. Ada satu perbedaan kecil antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengindikasikan bahwa penelitian ini tertarik untuk mempelajari bagaimana KPU memiliki upaya meningkatkan pemilih pemula untuk berpartisipasi politik, sementara itu penelitian terakhir lebih berkonsentrasi pada taktik yang digunakan untuk melakukan hal tersebut. Lokasi penelitiannya berbeda-beda sehingga membuat orang beranggapan bahwa objek dan subjek penelitiannya juga berbeda. Inilah perbedaan keduanya.

2.2 Deskripsi Kerangka Teori dan Konsep

Teori dan gagasan yang berkaitan dengan tema kajian akan dibahas pada subbab ini. Pada bagian ini, penulis akan memperjelas teori dan konsep dari para ahli di bidang strategi, partisipasi politik, dan pemilih pemula.

2.2.1 Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Negara demokrasi merupakan negara yang melibatkan masyarakatnya dalam mengambil keputusan, dimana dalam hal ini seluruh masyarakat wajib dan berhak berpartisipasi pada segala aspek kehidupan bernegara. Partisipasi ini terdiri atas aspek kehidupan swecara keseluruhan dalam kehidupan berpolitik. Melalui partisipasi politik yang dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat ini menyangkut kebutuhan masyarakat secara universal yang nantinya bisa diwujudkan. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik baik secara individu ataupun kelompok ini merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kepentingan umum (Setiadi and Kolip 2013:127–28).

Partisipasi politik pada masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya ini berbeda-beda, hal ini bisa bervariasi dalam masyarakat. Hal ini tergantung dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan partisipasi politik itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat pada politik ini bisa saja menumbuhkan motivasi masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi. Adanya partisipasi politik masyarakat ini ialah dengan keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela tanpa adanya paksaan (Yunus and Sussilowati 2017).

Ramlan Surbakti (Surbakti 2010) menyebutkan terdapat dua partisipasi politik yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menaati pemerintah, menerima dan melakukan setiap apa saja keputusan pemerintah. Sedangkan, partisipasi aktif ialah mengajukan pendapat mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan guna meluruskan kebijakan, membayar pajak serta memilih pemimpin pemerintah.

Partisipasi politik ini yakni konsep yang cukup terkenal dalam bidang ilmu politik. Sebagian besar ahli politik bersepakat bahwa partisipasi politik ialah suatu keadaan dimana masyarakat terlibat dalam kegiatan politik yang ada. Tujuan adanya kegiatan politik yakni untuk mempengaruhi tahapan perumusan serta implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Sitepu 2012:92). Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu *Pertama*, kegiatan politik bersifat dapat menimbulkan tuntutan terhadap pemerintah atau sistem politik. *Kedua*, kegiatan politik yang mendukung rumusan dan kebijakan pemerintah atau sistem politik (Rohaniah and Efriza 2015:468).

Partisipasi politik sendiri telah digolongkan oleh Milbarth dan Goel kedalam tiga golongan yaitu :

1. *gladiator* adalah mereka yang terlibat aktif dalam politik dengan jumlah yang sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga posisi mereka berada paling tinggi.
2. *spectator* dimana masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat pemilu.
3. *Apatis* ialah masyarakat yang apatis yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partisipasi politik yaitu kegiatan kelompok orang atau individu yang aktif pada kegiatan politik, dengan cara memilih pemimpin langsung ataupun tidak langsung, yang dimana partisipasi ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang dimaksudkan ialah seperti mengikuti gerakan sosial yang bersangkutan terhadap dunia politik atau menjadi anggota partai , mengikuti rapat umum, memberikan suaranya dalam pemilihan umum, memperbanyak reolasi guna bisa melakukan *lobbying* dengan petinggi pemerintahan atau anggota parlemen (Budiardjo 2008:367).

Herbert Mc Cloksy dalam (Budiardjo 2008:367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat secara sukarela dengan pengambilan keputusan dalam tahap pemilihan pemimpin secara langsung dan tidak langsung, serta mengambil bagian

proses rumusan kebijakan umum. Sementara itu, Hutingson dan Nelson dalam (Sahid 2011:177) mengutarakan pendapatnya mengenai partisipasi politik yang menyangkut kegiatan namun bukan berupa sikap melainkan komponen subjektif seperti halnya orientasi politik mengenai pengetahuan dan minat masyarakat pada politik, perasaan kompetitif dan keefektifan politik, serta pandangan relevansi politik tidak dimaksudkan. Sikap dan perasaan politik di anggap berhubungan terhadap tindakan politik akan namun terpisah dari tindakan politik.

Subjek yang dimaksud oleh Herbert Mc Cloksy dalam partisipasi politik ialah *private citizen* seperti pejabat pemerintahan dan partai, serta politikus. Kegiatan yang dimaksud dalam partisipasi politik hanya agar berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah terhadap sasarannya agar keputusan pejabat yang berkuasa berubah, mengganti ataupun mempertahankan pejabat yang ada dan organisasi sistem politik yang memiliki aturan tersendiri. Partisipasi politik ini termasuk semua kegiatan yang bisa mempengaruhi pemerintah. Partisipasi politik ini juga mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan.

Miriam Budiarto dalam (Sahid 2011:178) mengungkapkan bahwasannya partisipasi politik yakni kegiatan kelompok ataupun individu yang aktif ikut dalam segala hal yang berkaitan dengan politik seperti, pemilihan presiden, berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan kegiatan yang lainnya. Kemudian Gabriel Almond dalam (Sahid 2011:176) mengutarakan yaitu partisipasi politik awal kemunculannya dimulai dengan suara kepentingan seseorang. Secara umum partisipasi politik ialah keterlibatan masyarakat untuk ikut ambil peran dalam demokrasi, khususnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, serta masyarakat terlibat dalam seluruh kegiatan politik agar menentukan pemimpin berkuasa dan memberi pengaruh terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik sendiri telah digolongkan oleh Milbarth dan Goel kedalam tiga golongan yaitu :

4. *gladiator* adalah mereka yang terlibat aktif dalam politik dengan jumlah yang sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga posisi mereka berada paling tinggi.
5. *spectator* dimana masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat pemilu.
6. *Apatis* ialah masyarakat yang apatis yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Bentuk partisipasi politik masyarakat menjelaskan dan merumuskan seluruh kegiatan dalam partisipasi politik dengan sifat memberi dukungan pada pemerintah dan sistem politik. Menurut Sahid (Sahid 2011:178–79) partisipasi politik merupakan pemberian suara dalam pemilihan umum secara umum, akan tetapi apabila dipelajari bentuk partisipasi politik tidak memberi suara pada pemilu namun juga pada perbedaan macam dan jenisnya, menyesuaikan sudut pandang bentuk partisipasi politik itu direalisasikan. Pada sistem politik bentuk partisipasi politik dibagi menjadi beberapa strata yang dimana hal ini bentuk partisipasi ditunjukkan dan dilakukan masyarakat termasuk juga tingkatannya. Derajat dan bentuk partisipasi politik bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Derajat dan Bentuk Partisipasi Politik Almond

Derajat	Ruang Lingkup	Bentuk
Rendah	Urusan pridasi (spesifik)	Kontak langsung (<i>direct contact</i>)
Tinggi	Urusan spesifik (ekspresif)	Aktivitas proses (<i>proces activity</i>)
Sedang	Keputusan pemerintah (luas)	Pemberian suara (<i>voting</i>)
Tinggi	Kebijakan umum (aktivitas kolektif)	Kelompok informal (<i>informal group</i>), pergerakan sosial (<i>social movement</i>)

Sumber : Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Ghalia Indonesia 2011), hlm 179

Berikut penjelasan derajat dan bentuk partisipasi politik di atas, tersebut :

1. Kontak langsung (*direct contact*)

Bentuk partisipasi politik secara lebih sebagai kepentingan pribadi, sehingga derajat partisipasi politiknya tergolong rendah.

2. Aktivitas protes (*process activity*)

Munculnya bentuk partisipasi ini karena ada nya rasa tidakpuas kelompok tertentu atau masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk dari partisipasi politik ini ialah demonstrasi bahkan bisa menyebabkan timbulnya perilaku kekerasan. Bentuk partisipasi ini menurut Almond masuk kedalam derajat tinggi, sebab dari golongan masyarakat banyak yang melakukan Tindakan ini atau hanya perwakilan dari beberapa individu maupun kelompok.

3. Pemberian suara (*voting*)

Pemberian suara yang dimaksudkan ialah pemberian suara dalam pemilihan umum memiliki cakupan luas. Fungsi voting yaitu untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan sebab pada prosesnya bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan adanya voting ini. Derajat partisipasi politik pada voting ini termasuk ke dalam kategori sedang

4. Kelompok informal (*informal group*) dan pergerakan sosial (*social movement*)

Bentuk partisipasi politik dalam hal ini yakni kegiatan dari kumpulan orang tertentu dengan maksud untuk menyalurkan pendapat guna untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui pengadaan kumpulan organisasi untuk membahas bermacam-macam masalah yang dihadapi serta mencari tahu jalan keluar dari masalah tersebut. Derajat partisipasi politik termasuk kedalam kategori derajat tinggi sebab hanya segelintir orang yang ikut serta.

Huntington dan Nelson dalam (Suryadi 2007:131) menjelaskan bahwasannya bentuk partisipasi politik digolongnya sesuai dengan jenis perilakunya yaitu sebagai berikut :

- a) *Electoral Activity*, aktivitas pemilihan suara namun terdapat sumbangan kampanye, ikut andil dalam pemilihan, atau segala tindakan dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan.

- b) *Lobbying*, merupakan salah satu cara individu atau kelompok agar mengkontak pejabat pemerintahan serta pimpinan politik yang bertujuan mempengaruhi keputusan tentang permasalahan yang menyangkut keseluruhan masyarakat.
- c) *Organizational activity*, keikutsertaan masyarakat dalam organisasi sosial maupun politik.
- d) *Contacting*, merupakan partisipasi politik masyarakat secara langsung melalui komunikasi agar mampu membangun kerja sama
- e) *Violence*, yakni bentuk partisipasi politik dengan kekerasan agar mempengaruhi keputusan pemerintah. Kekerasan ini digunakan sebagai pemberontakan sehingga bisa memberi perubahan sistem politik melalui revolusi.

Menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 pasal 133 ayat 2, partisipasi masyarakat pada pemilihan umum bisa dilaksanakan pada pengawasan tahap pemilihan, pendidikan politik untuk pemilih, sosialisasi pemilihan, survey maupun rekam jejak pendapat mengenai pemilihan dan hasil penghitungan cepat dari pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan hal berikut :

- a. Tidak melakukan kepihakan pada salah satu pasangan calon presiden, gubernur, walikota, bupati yang memberi keuntungan atau menjadikan salah satu pihak rugi.
- b. Tidak mengganggu dalam proses tahap pemilihan.
- c. Memiliki tujuan dalam melakukan peningkatan partisipasi politik masyarakat.
- d. Mewujudkan suasana kondusif penyelenggara pemilihan yang tertib, aman, damai dan lancar.

c. Kelompok dalam Partisipasi Politik

Kelompok -kelompok partisipasi politik ini memiliki kepentingan untuk melakukan upaya mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, serta untuk menentukan pilihan pemimpin. Gabriel Almond dan Bingham Powel dalam (Budiardjo 2008:387-88) membagi kelompok kepentingan menjadi empat asoek sebagai berikut :

- a) Kelompok Anomi

Kelompok anomi tidak mempunyai organisasi tidak memiliki organisasi, namun orang di dalamnya memiliki ketidakpuasan yang sama sehingga menimbulkan adanya gerakan massal akibat rasa tidak puas atas kebijakan

pemerintah. Misalnya melakukan demonstrasi dan pemogokan yang dimana bisa menyebabkan tindak kekerasan.

b) Kelompok Nonasosiasional

Adanya kelompok nonasosiasional dimulai dengan rasa solidaritas tinggi antar kelompok, kerabat, etnis, pekerjaan, dan saudara. Kelompok tidak aktif dalam kegiatan politik, namun anggotanya memiliki ikatan batin kuat. Misalnya paguyupan pedagang kaki lima, paguyupan petugas parkir, paguyupan ojek, dll.

c) Kelompok institusional

Kelompok ini lebih bersifat formal sehingga keberadaannya yang memiliki sifat resmi dan terstruktur jelas seperti PGRI, PPNI, KORPRI, Dharma Wanita.

d) Kelompok Assosiasi

Kelompok ini terbentuk terarah dan jelas sehingga bisa disebut sebagai kelompok yang efektif dari kelompok yang lainnya. Misalnya, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.

e) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga ini ialah kelompok masyarakat sebagai cerminan kebangkitan kesadaran pada golongan masyarakat menengah pada ketidakadilan sosial dan kemiskinan. LSM ini banyak membantu memperjuangkan hak masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. LSM ini memiliki peran dalam memberi pengaruh terhadap kebijakan politik pemerintah.

d. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Politik

Suatu Negara yang melakukan penerapan demokrasi sebagai sistmenya maka partisipasi politik masyarakat bisa sebagai acuan serta pertimbangan negara dalam menerapkan sistem demokrasi dengan baik. (Budiardjo 2008) menjelaskan bahwasannya partisipasi politik memiliki tujuan mempengaruhi setiap tahap politik dalam menentukan pengambilan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang di ambil oleh pemerintah harus berpihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga partisipasi politik harus dilakukan masyarakat secara benar. Untuk menciptakan kehidupan negara yang lebih baik dan membangun suatu system politik yang stabil maka melalui partisipasi politik inilah salah satu caranya.

Menurut Robert Lane dalam buku Rush dan Althoff, 2005 (Sahid 2011:184) menjelaskan terdapat 4 fungsi partisipasi politik untuk individu :

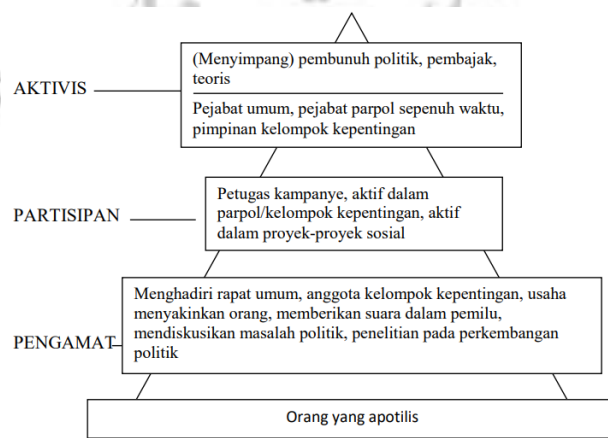
- a) Partisipasi politik memenuhi kebutuhan sosial dan mendukung program-program pemerintah.
- b) Sebagai wadah untuk mengejar nilai khusus serta sebagai organisasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat terkait masukan atau kritik untuk pemerintah yang berguna untuk memberikan arahan dan peningkatan dalam pembangunan.
- c) Sebagai wadah untuk mencukupi kebutuhan ekonomis.
- d) Sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu

(Sahid 2011) mengutarakan pendapatnya terkait dengan partisipasi politik ini memiliki fungsi untuk pemerintah yaitu agar menyokong program pemerintah sehingga peran masyarakat disini terwujudkan mendukung program politik dan pemerintah. Dari banyaknya pendapat maka bisa disimpulkan bahwasanya fungsi dan tujuan partisipasi politik ini ialah sebagai media untuk mengutarakan pendapat masyarakat agar lebih terarah dan terkontrol terkait kebijakan pemerintah yang menkadikan pembangunan negara terfokus pada suara serta kepentingan masyarakat guna bisa memberi perwujudan kehidupan politik dinamis dan kuat sekaligus sebagai media pengembangan sistem politik sehingga mekanismenya dapat berjalan sesuai tahap.

e. Tingkatan Partisipasi Politik

Tingkatan partisipasi politik di negara ini berbeda akibat keadaan social politik di negara tersebut. Tetapi tingkatan partisipasi politik secara umum dikelompokkan berdasarkan bentuk piramida sebagai berikut:

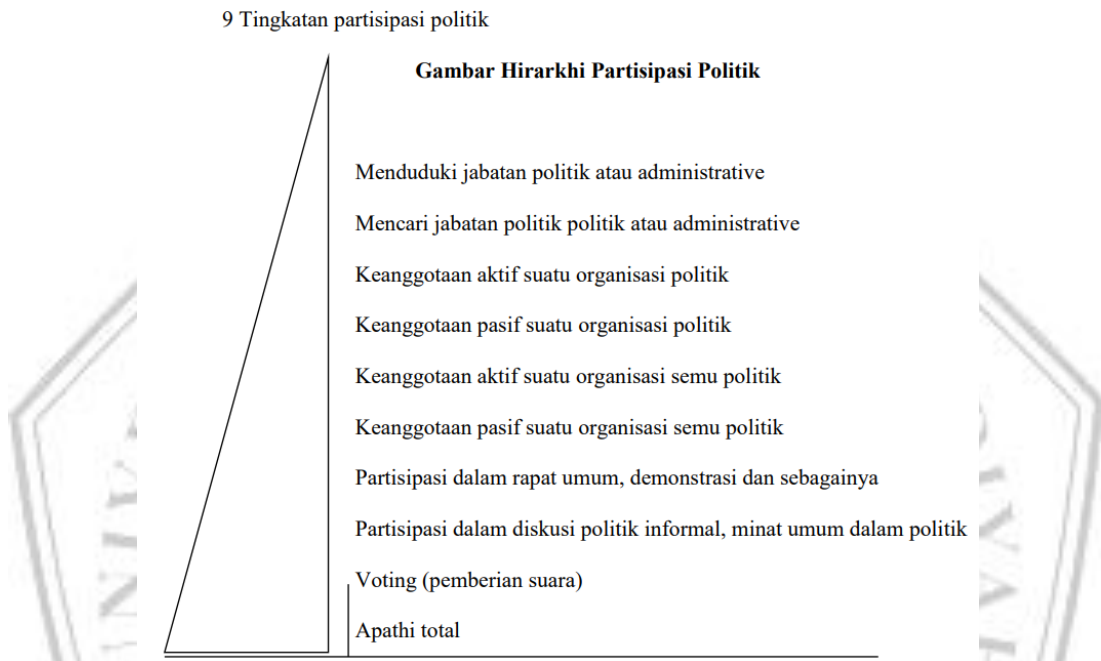
Gambar 2.1 Tingkatan Partisipasi Politik



Sumber :Roth dan Wilson, 1980. dalam (Suryadi 2007:136)

Roth dan Wilson (1980) dalam (Suryadi 2007:137) menyebutkan bahwa pembagian jenis partisipan ini didasarkan pada intensitas dan frekuensinya. Beliau menjelaskan jika orang melakukan kegiatan tidak intensif, seperti halnya memberikan suara pada pemilu yang banyak melibatkan orang, dan sebaliknya jika sedikit orang aktif dan melibatkan diri pada dunia politik sepenuh waktunya.

Gambar 2.2 Hirarki Partisipasi Politik



Sumber: dalam buku (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:139)

Sumber : Buku (Suryadi 2007:139)

Kedudukan tertinggi hirarki diduduki oleh berbagai macam orang dan jabatan pada sistem politik, untuk pemegang jabatan politik ataupun anggota birokrasi. Keseluruhan kedudukan ini terbedakan atas partisipasi politik lain sehingga berbagai taraf kepentingannya dengan implementasi kekuasaan politik formal.

f. faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Kegiatan partisipasi politik masyarakat ini terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan mendorong masyarakat agar ikut andil pada kegiatan politik. Rush dan Althoff dalam (Budiardjo 2008) mengungkapkan bahwasanya sosialisasi politik ialah salah satu proses individu sehingga bisa mendapat pengetahuan, sikap dan nilai terhadap sistem politik. Tidak hanya itu menurutnya partisipasi politik bervariasi dan berhubungan dengan empat factor utama, yaitu *pertama*, sebisa apa individu bisa menerima rangsangan politik.

Kedua, karakteristik yang dimiliki oleh individu. *Ketiga*, karakteristik hubungan social individu dan *Keempat*, kondisi politik maupun lingkungan politik individu sehingga bisa menjadi dirinya sendiri.

Frank Lindenfield dalam (Sahid 2011:185) mengungkapkan pendapatnya jika factor yang menyebabkan seseorang ikut berpartisipasi dalam bidang politik ialah karena kepuasan finansial yang dimana menurut mereka status ekonomi rendah mengakibatkan seorang individu merasa tereliminasi dari kehidupan berpolitik, sehingga menyebabkan individu terkait menjadi apatis, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada orang dengan ekonomi stabil dan bisa dibilang mapan.

Menurut Surbakti dalam (Sahid 2011:185) menjelaskan dua penyebab penting partisipasi politik yang memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi. *Pertama*, kesadaran politik individu mencakup kesadaran kewajiban dan hak warga negara seperti halnya ekonomi, hak perlindungan hukum, politik, jaminan sosial. *Kedua*, berhubungan dengan mengapresiasi dan menilai terhadap pemerintah, mulai dari kebijakan ataupun implementasinya. Sedangkan menurut Weimar dalam buku sastroatmodjo (Sahid 2011:185–86) mengungkapkan ada lima sebab munculnya partisipasi politik yakni :

- a) Modernisasi pada keseluruhan aspek kehidupan yang mengakibatkan masyarakat melakukan penuntutan serta ingin ikut andil dalam kekuasaan berpolitik.
- b) Perubahan strata kelas, yang dimana siapapun berhak berpartisipasi serta mengikuti perumusan keputusan politik penting yang menyebabkan perubahan pola partisipasi politik.
- c) Pengaruh kaum intelektual serta komunikasi di masa modern. Ide partisipasi politik ini sudah tersebar pada seluruh negeri sebelum mereka berkembang seperti sekarang.
- d) Konflik antar kelompok pemimpin politik. Apabila terjadi konflik petinggi sehingga sangat dibutuhkan dukungan rakyat dalam hal ini karena perjuangan untuk melawan kaum arisstocart yang membuat kaum buruh memperlebar jangkauan hal pilihnya.

- e) Keterlibatan pemerintah pada urusan sosial, ekonomi dan budaya. Memperluas cakupan kegiatan pemerintah yang memicu tuntutan terorganisasi dan terdapat kesempatan ikut andil dalam pembuatan keputusan politik.

Terdapat banyak factor yang mempengaruhi terjadinya partisipasi politik masyarakat di suatu negara, salah satunya ialah factor ekonomi, kurangnya kesadaran politik, pengaruh kaum intelektual, penilaian yang kurang bagus dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta budaya politik yang kurang bagus dalam negara tertentu. Tetapi dari banyaknya faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik, faktor kesadaran politik yaitu faktor yang utama sebab tanpa adanya kesadaran politik yang ada dalam diri seorang individu maka cukup sulit untuk menumbuhkan partisipasi politik suatu negara. Sebab secara umum masyarakat baik ialah warga negara memiliki kesadaran politik yang tinggi pada berkembangnya politik di negara tertentu.

2.2.2 Strategi

a. Definisi Strategi

Kata “strategis” sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “strategos” yang artinya “seni umum” dan lama kelamaan menjadi sinonim “strategi militer” yang sesuai dengan dunia bisnis modern. Secara keseluruhan, strategi adalah cara merencanakan ke depan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi komunikasi dipandang sebagai visi komunikasi dan tujuan utama komunikasi dalam proyek yang sukses. Strategi ini berkaitan terhadap tujuan dan sasaran, lingkungan eksternal, sumber daya internal, persaingan, komunikasi, dan pembuat strategi yang semuanya terhubung dengan strategi ini.

Strategi menurut Rosady Ruslan dalam (Haryono 2018) diartikan sebagai suatu cara pengelolaan dan perencanaan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam pelaksanaan operasionalnya. Strategi didefinisikan pertama oleh Jauch & Glueck dalam (Nuroni and Adiguna 2017) menjelaskan bahwa strategi yakni rencana yang disusun secara matang dan terpadu dengan menghubungkan manfaat strategi organisasi dengan keadaan eksternal yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan utama organisasi terpenuhi dengan penerapan yang efektif pada organisasi. Sedangkan Salusu (2006:101) menyebutkan strategi sebagai seni dalam penggunaan keterampilan sumber daya organisasi agar mencapai sasarannya dengan cara menggunakan hubungan efektif terhadap keadaan lingkungan sekitar dalam kondisi menguntungkan.

mendefinisikan strategi seni memanfaatkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan dengan keadaan menguntungkan dan interaksi produktif dengan lingkungan eksternal.

Strategi penting agar dipahami jajaran manajer, direktur, ketua, eksekutif, direktur, pejabat junior dan senior, pejabat rendah, menengah serta tinggi. Hal ini wajib untuk didalami sebab strategi dilakukan setiap kalangan pada tiap-tiap tingkatan. Dari penjelasan diatas, strategi dapat disimpulkan sebagai suatu seni yang digunakan untuk Menyusun rencana suatu organisasi dalam memastikan tujuannya agar bisa tercapai dan terlaksana dengan baik sekaligus efektif. Strategi ini dibuat agar dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar organisasi. Strategi menyesuaikan kemampuan dengan sumber daya organisasi dan lingkungan bisa dipastikan memperoleh pencapaian tujuan sesuai keinginan.

Pada dasarnya strategi ialah kerangka dasar organisasi yang memanfaatkan sumberdaya di organisasi tersebut agar tujuan tercapai, strategi berkaitan terhadap lingkungan guna memperoleh hubungan yang saling menguntungkan. Strategi menjadi fleksibel di terapkan di lingkungan apabila dibuat dengan menyesuaikan lingkungan yang berubah.

b. Tingkat- tingkat Strategi

Tingkatan strategi ini tidak terlepas dari pembentukan perencanaan dan juga strategi, yang dimana terdapat 4 tingkatan strategi :

a) *Enterprise Strategy*

Pada tingkatan ini erat kaitannya terhadap respon masyarakat. Tingkatan ini bisa dilihat melalui relasi organisasi dengan masyarakat luar yaitu sejauh mana interaksi tersebut nantinya dilakukan sehingga dapat memberi keuntungan organisasi tersebut. Dengan adanya strategi ini bisa menjadi bukti bahwa organisasi ini memiliki kesungguhan dalam berusaha dan bekerja sehingga dapat memberi pelayanan baik pada kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat.

b) *Corporate Strategy*

Tingkatan ini seringkali dikaitkan terhadap tujuan organisasi dan disebut sebagai *grand strategy* yang merupakan suatu aspek yang di tekuni oleh suatu organisasi. Pihak internal organisasi dalam hal ini sangat membutuhkan keputusan strategi dan perencanaan strategi yang layak.

c) *Business Strategy*

Tingkatan ini menjelaskan cara untuk merebut pasar di lingkungan masyarakat, dimana hal ini organisasi bisa ditempatkan pada hati pengusaha, penguasa, pejabat lain. Strategi ini di buat untuk mendapatkan keuntungan strategi dan juga untuk memberi tunjangan terhadap perkembangan organisasi pada tingkatan yang tinggi.

d) *Fungsional Strategy*

Tingkatan ini berfungsi sebagai strategi pendukung guna memberi tunjangan terlaksananya strategi lainnya. Terdapat 3 jenis strategi fungsional yakni :

- a) *Strategi fungsional ekonomi*, merupakan strategi yang terdiri atas fungsi organisasi hidup menjadi kesatuan ekonomi sehat seperti berhubungan dengan promosi/ pemasaran, keuangan, penelitian, pengembangan dan sumber daya.
- b) *Strategi fungsional manajemen*, menaungi fungsi manajemen seperti *organizing, planning, leading, controlling, staffing, communicating, motivating, representing, integrating, decision making*.
- c) *Strategi isu stratejik*, berfungsi untuk melakukan pengontrolan lingkungan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan lingkungan yang diketahui dan yang belum diketahui.

D) Tipe – Tipe Strategi

Selanjutnya (J.Salusu 1996) menjelaskan tipe strategi :

a) *Corporate Strategy*

Strategi ini berhubungan terhadap performulasian nilai, misi, tujuan, dan inisiatif strategi baru.

b) *Program Strategy*

Strategi ini difokuskan terhadap akibat strategi dari suatu program. Lebih berfokus ke dampak jika program tersebut berjalan dan apa dampaknya untuk organisasi.

c) *Resource Support Strategy*

Strategi sumber daya ini terfokus dalam melakukan pemaksimalan memanfaatkan sumber daya esensial untuk peningkatan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut yaitu keuangan, tenaga, dan teknologi.

d) *Institutional Strategy*

Strategi ini memusatkan perhatian dalam pengembangan kemampuan organisasi guna bisa melakukan inisiatif strategi.

E) Elemen-elemen Strategi

Pada buku (J.Salusu 1996) menyebutkan terdapat beberapa elemen-elemen strategi seperti sasaran dan tujuan, produk keunggulan, lingkungan dan sumber daya, pola keputusan, dan pemimpin. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan elemen strategi sebagai berikut :

a) **Sasaran dan Tujuan**

Secara umum adanya strategi merupakan awal dari perumusan sasaran dan tujuan dalam jangka panjang pada organisasi serta penggunaan rangkaian tindakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan agar tujuan tercapai. Terdapat tiga komponen penting strategi, yaitu sasaran dan tujuan, cara bertindak, serta alokasi sumber daya dalam mendapatkan tujuan.

b) **Produk Keunggulan**

Produk atau lingkup pasar, keunggulan kompetitif dan sinergi bisa juga disebut sebagai strategi. Yang dimana ruang lingkup strategi dimaksudkan untuk menyesuaikan pasar atau di wilayah tertentu.

c) **Sumber Daya dan Lingkungan**

Suatu proses yang berlanjut dan berhubungan efektif dengan sumber daya dan sasaran organisasi terhadap peluang lingkungan atau dapat disebut sebagai manajemen strategi. Strategi ialah suatu rencana kerja agar memaksimalkan kekuatan pihak dalam menghadapi masalah di lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam organisasi tanpa mengingkari hubungan terhadap sumber daya organisasi.

d) **Pola Keputusan**

Strategi secara tegas menyebutkan bahwasannya pola keputusan dalam suatu organisasi menampilkan dan membentuk sasaran dan tujuan organisasi. Dalam hal ini akan menimbulkan rencana dan kebijaksanaan agar mencapai suatu tujuan.

e) **Pemimpin**

Strategi dalam hal ini menegaskan bahwa konseptualisasi yang di rumuskan oleh pemimpin suatu organisasi ini harus memiliki sasaran kebijaksanaan dan kendala, jangka panjang, serangkaian rencana yang dilakukan mengenai tujuan jangka pendek yang layak agar memberi kontribusi untuk mencapai sasaran organisasi.

F) Pembentukan Strategi

Strategi yang sudah disusun dan bisa berhasil, ada beberapa petunjuk agar strategi yang dibuat dapat sukses yakni dengan cara sebagai berikut :

1. Strategi diharuskan konsisten terhadap lingkungannya. Membuat strategi dengan mengikuti perkembangan di lingkungan masyarakat dan tidak melawan arus. Dengan memperhatikan perkembangan di lingkungan masyarakat maka ada peluang untuk bisa bergerak maju.
2. Bergantung pada cakupan kegiatan. Jika memiliki strategi yang banyak maka harus konsisten atau berkaitan dan harus diselaraskan dengan strategi yang lainnya dan tidak bertolak belakang.
3. Strategi efektif ialah berfokus dan bisa mempersatukan sumber daya tanpa dibedakan. Persaingan yang tidak sehat pada organisasi dengan sumber dayanya dan membiarkannya terpisah dengan yang lain, hal ini bisa merugikan suatu posisi organisasi.
4. Strategi berfokus pada kekuatan dan tidak pada titik yang menjadi kelemahan. Dalam hal ini harus bisa membuat langkah yang tepat dan memanfaatkan kelemahan lawan dalam memposisikan kompetitif kuat.
5. Sumber daya yakni hal kritis sehingga menjadi hal layak untuk dilaksanakan.
6. Strategi juga harus memperkirakan resiko yang akan terjadi dan harus berhati-hati sehingga organisasi tidak terjerumus pada lubang besar. Strategi dalam hal ini harus selalu di control.

7. Strategi disusun bukan atas kegagalan melainkan tersusun atas landasan keberhasilan yang sudah dicapai.
8. Suksesnya suatu strategi bisa dilihat dengan dukungan pihak yang berkaitan terutama eksekutif dan seluruh pimpinan unit kerja pada organisasi (J.Salusu 1996).

2.2.3 Pemilih Pemula

Negara Indonesia membagi 3 kategori untuk pemilih pemula. *Pertama*, pemilih kritis emosional yaitu pemilih idealis serta tidak terbuka untuk berkompromi. *Kedua*, pemilih rasional yakni pemilih yang memilih pemimpin ataupun partai dengan cara menilai dan menganalisis secara mendalam. *Ketiga*, pemilih pemula ialah pemilih yang pertama kali memberikan suaranya sebab usianya baru memasuki usia memilih yang telah ditetapkan di Undang-undang (Rahmat and Esther 2016). Pemilih pemula menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum pada Bab IV pasal 198 ayat 1 mengatakan bahwa pemilih pemula yang dimaksud ialah WNI ketika pemungutan suara memiliki usia 17 tahun ataupun lebih, dan atau sudah pernah kawin sehingga memiliki hak pilih.

Pemilih pemula sendiri ialah masyarakat yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu pada daftar pemilih tetap dan baru akan mengikuti pemilu atau member suaranya untuk pertama saat pemilu di Indonesia pada rentang usia 17 hingga 21 tahun. Golongan pemilih pemula sebagian besar berstatus sebagai mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda. Sebagian besar dari pemilih tersebut ialah siswa SMA/SMK/MA, dan mahasiswa ataupun sudah atau pernah menikah. Pemilih pemula di negara demokrasi ini menjadi objek dalam aktifitas politik yang dimana mereka masih membutuhkan bantuan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan potensi serta kemampuannya pada tingkatan yang lebih baik sehingga mereka bisa mengambil peran di bidang politik. Pemilih pemula ini merupakan salah satu potensi yang baik dari sisi politik praktis ataupun dari sisi politik kepentingan masa depan bangsa.

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan ciri pemilih pemula ialah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang saat hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau telah menikah.

- b. Baru memberikan suara atau mengikuti pemilu sejak dilakukan pertama kali di Indonesia pada rentang usia 17 hingga 21 tahun.
- c. Memiliki hak untuk melakukan pemilahan pada pemilu.

Dalam pemilihan umum terdapat ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menggunakan hak pilihnya :

- a. WNI memiliki umur 17 tahun atau lebih ataupun sudah pernah melakukan pernikahan.
- b. Tidak dalam gangguan kejiwaan atau ingatan.
- c. Terdaftar menjadi pemilih
- d. Bukan anggota atau pernah menjadi anggota TNI/POLRI.
- e. Hak pilihnya tidak dicabut.
- f. Ada pada daftar pemilih tetap.

Pemilih pemula terkhususnya remaja dengan usia 17 tahun memiliki nilai kebudayaan sendiri yang bebas, santai, terkadang berfokus pada hal informal dan suka mencari kesenangan, sehingga banyak remaja yang menghindari hal yang menurut mereka tidak terlalu menyenangkan. Pemilih pemula ini mempunyai antusias yang baik namun belum bisa memastikan pilihannya, sehingga pemilih pemula di tempatkan sebagai swing voters yang sebenarnya. Motivasi ideologis belum bisa mempengaruhi hak pilih politik mereka serta didorong dengan konteks dinamika pada lingkungan politik yang cenderung mudah terpengaruh kepentingan keluarga dan teman.